

## **PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Mashuri

Dosen Tetap STIE Syariah Bengkalis  
Sungai Alam-Bengkalis-Riau Kode Pos 28751

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peranan penting yang aktif dalam bidang keuangan non Bank. Kehadiran Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) dalam suatu wilayah dilandasi karena belum “terjamah” dan terjangkaunya masyarakat lapis bawah (masyarakat miskin) oleh lembaga keuangan perbankan. Keberadaan BMT merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi para pemimpin umat dan praktisi perbankan Syariah, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian, sehingga keberhasilan BMT dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang capable dan credible. Untuk itu, upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performancenya dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis. Telah terbukti bahwa BMT memiliki peranan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, ini dapat dilihat dari lowongan-lowongan yang diciptakan BMT melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM.*

**Kata kunci : Peranan BMT, Pemberdayaan Ekonomi.**

### **A. PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan taraf hidup penduduknya. Pada negara berkembang umumnya kehidupan masyarakat berada dalam kondisi yang sifatnya masih tradisional dimana kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Tingginya angka kemiskinan menjadi pertanda bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan bermakna memberikan hak-hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas berat bagi pemerintah dan tugas ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa sinergi dengan pihak lain (swasta).

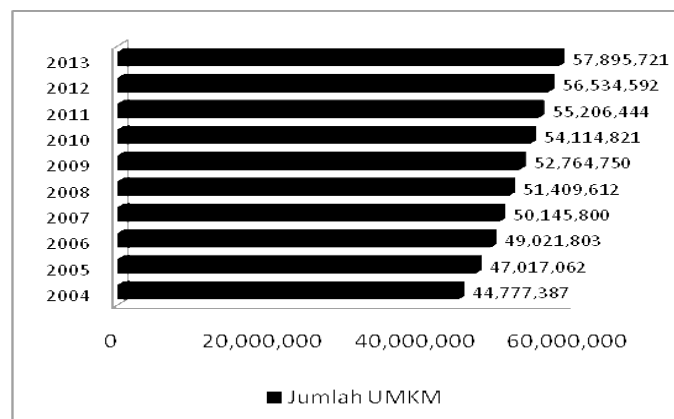
Kerja sama yang baik harus dijalankan agar tujuan pencapaian bisa didapatkan. Peranan swasta dan kewirausahaan dalam mengatasi kemiskinan sangat besar andilnya. Terbukti krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia kala itu hampir kewalahan menghadapinya namun akhirnya hanya dengan langkah Usaha Mikro (kewirausahaan) ternyata krisis yang melanda dapat teratasi.

Secara historis, usaha kecil mikro di Indonesia telah menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dengan demikian, usaha kecil mikro ini menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Bagi rumah tangga petani miskin yang berpendapatan rendah di pedesaan, usaha kecil mikro di bidang non-pertanian menjadi alternatif sumber pendapatan.<sup>1</sup> Bahkan usaha kecil mikro ini telah menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya.

UKM berperan serta mengentaskan kemiskinan meski dengan skala usaha dan pangsa pasar yang relatif terbatas. Berdasarkan hasil penelitian Tambunan<sup>2</sup> memperlihatkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki ragam usaha yang luas, terutama terkonsentrasi pada sektor pertanian, hotel dan restoran. Selain itu, terdapat pula industri manufaktur sederhana seperti produksi kayu, *furniture*, tekstil, sepatu, makanan dan minuman.

Kondisi UMKM di Indonesia tumbuh secara signifikan dari tahun ke-tahun, hal ini dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :

**Tabel.1. Pertumbuhan UMKM Indonesia  
(dalam unit) tahun 2004 – 2013**



Sumber : *depkop.go.id*

<sup>1</sup> Tulus Tambunan : *Do Economic Growth and Government Support Matter?* Social Science Research Network, (2007).

<sup>2</sup> Tulus Rambunan, *Recent Development of Women's Enterprises in Indonesia*, Kadin – Indonesia”, (2007), h. 5

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa UMKM Indonesia tumbuh dan berkembang setiap tahunnya dengan angka yang signifikan. Dari sisi output yang dihasilkan, UMKM memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. Menurut data statistik dalam angka departemen koperasi bahwa pada tahun 2012 sektor UKM dari sisi jumlah unit usaha mencapai 99 persen dari total pelaku usaha nasional atau sebanyak 54,559 unit usaha (98,82 persen) di antaranya merupakan usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset per tahun maksimal Rp300 juta. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB (produk domestik bruto) nasional menurut harga berlaku mencapai 57 persen dan 43 persen sisanya dikontribusikan oleh usaha besar.<sup>3</sup> Secara rata-rata, kontribusi output UMKM terhadap tingkat pertumbuhan PDB adalah di atas dua persen, Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi usaha kecil dan menengah lebih mendominasi dalam sumbangan PDB.

Untuk dapat meningkatkan lagi kontribusi output perolehan barang dan jasa tentu diperlukan kinerja yang maksimal baik bagi pihak pemerintah maupun pihak swasta. Karena adanya keterbatasan akses antara masyarakat kecil dengan pihak pemodal, maka pemerintah Indonesia sudah dari awal mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil* sejak 7 Desember 1995) sebagai gerakan.<sup>4</sup> Gerakan nasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan *Baitul Maal* dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*.

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, Perkembangan kinerja BMT secara nasional berkembang sangat signifikan. Hingga

---

<sup>3</sup> [depkop.go.id/berita-informasidata-informasidata-koperasi](http://depkop.go.id/berita-informasidata-informasidata-koperasi)

<sup>4</sup> Mohammed Obaidullah, *Islamic Research and Training Institute*, Member of Islamic Development Bank Group, (2008), h.49

maret 2015 aset BMT mencapai sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun.<sup>5</sup>

Bisnis Koperasi BMT adalah bisnis yang sarannya untuk masarakat dikalangan bawah sesuai dengan ketentuan peraturan. Banyaknya karyawan perusahaan yang di PHK kan akhir-akhir ini membuat bisnis BMT menjadi semakin meningkat terhadap permintaan akan jasanya.

Berkembangnya bisnis koperasi BMT tentu tidak lepas dari optimalisasi seluruh kinerja yang ada dalam tubuh internal organisasi usaha tersebut. Tidak semua koperasi BMT sanggup bertahan dan mampu bersaing dengan usaha yang sejenis dengannya. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Walaupun faktor internal memiliki peranan penting dalam kemajuan BMT, namun tidak kalah penting yang menjadi sasaran dalam keberhasilan peranan BMT adalah efektifitas peranan BMT itu sendiri dalam pemberdayaan umat. Maksudnya apakah BMT dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan visi dan misi dalam hal pemberdayaan umat bagi kalangan masyarakat bawah. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas penulis ingin mengetahui tentang peran BMT untuk mencapai tujuan koperasi syariah dalam meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat potensial untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan modal pada bisnis skala mikro. Sungguhpun demikian, masalah yang penting untuk dikaji melalui studi ini adalah: Apakah *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* berperan aktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Baitul Maal Wattamwil (BMT) secara etimologis terdiri dari dua arti *Pertama*, *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta), fungsinya untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Kedua*, *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta), fungsinya untuk menerima dana zakat, infak dan shadaqah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Kajian Akuntansi dan Manajemen Islamai FSI FEUI, 2008) Menurut Hamidi (dalam Aulia, 2009), prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT, diantaranya :

---

<sup>5</sup> Republika.co.id. Jakarta, Maret 2015

- 1) Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Sistem jual beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu *murabahah* dan *Ba'i Bit'tsaman Ajil*.
- 3) Sistem Non Profit, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut *Qordhul Hasan*.

Adanya berbagai kendala yang dihadapi BMT, maka diperlukan beberapa strategi yang dapat mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Menurut Sudarsono<sup>6</sup> strategi tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak dapat diabaikan, misalnya kerja sama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis Islami.
- 2) Strategi pemasaran yang hanya berorientasi di daerah local berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT diluar masyarakat dimana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT, maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, oleh karena kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab, yaitu :
  - (a) Timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syari'ah
  - (b) Memahami produk BMT hanya seperti yang ada
- 4) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan.

---

<sup>6</sup> Sudarsono ; *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta, 2003.

- 5) Pengembangan aspek paradigma, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- 6) Sesama BMT sebagai mitra dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syariah ataupun bank syariah merupakan satu kesatuan dengan lainnya yang memiliki tujuan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
- 7) Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang diperlukan tersebut antara lain dalam hal sumber daya manusia, mutu dan kualitas pelayanan, dan juga dalam hubungannya dengan pihak luar sebagai mitra kerjanya.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia..

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Belakangan ini BMT semakin populer di perbincangkan terutama dalam perekonomian Islam. BMT yang juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tanwil (BMT) saat ini sudah ada BMT yang mentargetkan aset senilai Rp 2 triliun. BMT tersebut adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana dalam RAT tahun 2014 mencapai

aset Rp 1,4 triliun. Sementara BMT-BMT lainnya yang terus merangkak naik yang hampir Rp 1 triliun adalah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta. Besarnya aset BMT tersebut tidak lepas dari peran BMT yang mampu mengelola koperasi dengan profesional dan modern. (REPUBLIKA.CO.ID). Secara nasional BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang dalam usia 10 tahun sudah berhasil mengonsolidasi 561 BMT berbadan hukum koperasi. Dengan memiliki aset Rp 11,9 triliun dan memiliki anggota 2.694.013 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. (REPUBLIKA.CO.ID, Okt 2015).

## 2. Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Ekonomi Masyarakat

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir. Lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP) Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur'an seperti berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ  
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah ayat 261).*

Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Peran umum *baitul maal wa tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai

tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Indonesia menganut sistem perekonomian pancasila yakni sistem ekonomi campuran yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Arti dari sistem ini yaitu yang menganut sistem pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalannya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.

Akan tetapi pada kenyataannya sistem ekonomi pancasila tidaklah sama dengan realitasnya. Sistem ekonomi Indonesia semakin lama terlihat semakin menuju liberal khas Amerika artinya nilai-nilai ekonomi pancasila mulai ditinggalkan, dan munculnya persaingan usaha baru yang didominasi oleh swasta, terutama oleh swasta asing melalui kerjaan bisnis multi nasional corporation. Keadaan ini jelas membahayakan dan merugikan. Dikatakan berbahanya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan dan juga akan terjadi persaingan *Baitul tamwil* termasuk lembaga keuangan islam yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*) kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau markup/margin yang berlandaskan sistem syariah. Adapun ciri-ciri BMT :

- a. Berbadan hukum koperasi
- b. Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya
- c. Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya, sedangkan mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah non riba.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung BMT setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antaralain<sup>8</sup> :

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian

---

<sup>7</sup> M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431

<sup>8</sup> Wahyu Dwi Agung, "*BMT Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*", hlm. 6.



BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan *Qardul Hasan* (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Pada sektor finansial, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *qardul hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

Pada sektor riil, peran BMT dalam mendorong sektor riil juga diakui Bank Indonesia (BI). BMT menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses modal ke perbankan karena ada prosedur-prosedur yang susah dan tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat kecil seperti memiliki agunan yang memadai dan lain sebagainya. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Pada sektor religious, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin.

#### **E. Kesimpulan**

Peran BMT merupakan salah satu kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan, sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perspektif tekno-ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT. Di samping berfungsi sebagai alat (*tools*) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dalam peranannya BMT selalu berprinsip kepada tiga sektor yang harus mendapat keutamaan, pertama sektor finansial, kedua sektor riil, dan yang ketiga sektor religious. Sektor-sektor ini

dinilai mampu memberdayakan sumber-sumber yang ada bagi UMKM Indonesia dewasa ini.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Mohammed Obaidullah, "Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences Selected IDB Member Countries", *Islamic Research and Training Institute*, Member of Islamic Development Bank Group, 2008

M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431

Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003.

Tulus Tambunan, "SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Support Matter?" *Social Science Research Network\_ SSRN-id1218922*, (2007), 3.

Tulus Rambunan, "Recent Development of Women's Enterprises in Indonesia, Kadin-Indonesia", 2007.

<http://www.depkop.go.id/berita-informasidata-informasidata-koperasi>

<http://www.republika.co.id>, Okt 2015